

Pembangunan dan Ekonomi Politik Turisme Massal di Daerah Istimewa Yogyakarta

The Development and Political Economy Analysis of Mass Tourism in The Special Region of Yogyakarta

Anggalih Bayu Muh Kamim¹

Institut Pertanian Bogor
Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp. dan Fax. 0251-8629227

(Diterima 13/12/22; Disetujui 11/04/23)

Abstract

This research aimed to explore the transition from community-based tourism into mass tourism which has been initiated by the government. Data was collected through in depth interviews, observation, and secondary data analysis. This research found that the central government has been creating mass tourism since the '80s, because the state was interested in making tourism become one of the main incomes after the end of oil boom era. Mass tourism was booming until the end of the '90s. Nevertheless, the decrease in international tourist arrival was occurred because of forest fires, economic crises, Bali Bombing I and II, and SARS pandemic. Unfortunately, Yogyakarta's earthquake in 2006 has hindered the recovery process. One decade after the earthquake, a mass tourism was booming again which was marked by the expansion of hotel construction. There were negative impacts such as lack of water access for public, repression of the labour movement, and policies that neglected public participation. The government continued to develop mass tourism through RPJMD DIY 2017-2022 as the nexus of central and local government interests. Projects from RPJMD DIY 2017-2022 were done by cultures and repressions mobilization, thus lead to another problems such as worsened public interests marginalization, land and labour privatization.

Keywords: *mass tourism, marginalization of community, privatization.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga, menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mendorong turisme massal sejak 1980-an karena negara berkepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama setelah ledakan bisnis minyak bumi berakhir. Turisme massal berkembang sampai akhir tahun 1990-an. Namun, harus menghadapi guncangan akibat kebakaran hutan, krisis ekonomi, Bom Bali 1 dan 2, serta wabah SARS. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sempat mengganggu proses

¹ Email: anggalih.bayu@yahoo.co.id

pemulihan. Satu dekade setelah gempa, turisme massal mulai berkembang, ditandai dengan masifnya pembangunan hotel. Dampak negatif muncul, berupa masalah akses warga terhadap air, pemukulan gerakan buruh, dan kebijakan yang tak memperhatikan partisipasi publik. Pemerintah terus mengembangkan turisme massal melalui RPJMD DIY 2017-2022 sebagai wujud pertemuan kepentingan pusat dan daerah. Berbagai proyek yang ada dalam RPJMD DIY 2017-2022 ternyata dilakukan dengan mobilisasi kebudayaan dan kekerasan, sehingga berujung pada peminggiran masyarakat dan bertambah parahnya privatisasi tanah dan tenaga kerja.

Kata Kunci: turisme massal, peminggiran masyarakat, privatisasi.

1. PENDAHULUAN

Kajian ini ingin mendalami pergeseran struktur ekonomi politik pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berdampak pada terpinggirkannya penghidupan rakyat. Penggalan dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan turisme massal tidak sebatas berpihak pada kepentingan pasar bebas untuk terus mengekstraksi nilai lebih, melainkan juga harus mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Turisme massal sendiri memiliki makna yang cair dan biasanya mengacu pada pariwisata skala besar, dengan jangkauan pasar global yang dikelola berdasar standar tertentu (Vainikka, 2013).

Kajian yang dilakukan oleh Sulistya (2016) menjelaskan bahwa dari tahun 2006 sampai 2014, perkembangan pariwisata DIY berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata tren jumlah turis asing sebesar 15,72% tiap tahun dan tren wisatawan domestik naik 20,29% (Sulistya, 2016, pp.65-72). Tren jumlah objek wisata naik sebesar 5,92% disebabkan masyarakat mulai sadar atas pengelolaan destinasi untuk peningkatan perekonomian. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) subsektor pariwisata DIY juga terjadi selama 2006-2014 dengan rata-rata sebesar 21,18% disebabkan pertambahan jumlah wisatawan yang datang, pajak bangunan, dan retribusi objek wisata (Sulistya, 2016, pp.81).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novandre pada tahun 2019, terungkap bahwa kunjungan wisatawan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PAD sektor pariwisata di wilayah kota/kabupaten DIY dari tahun 2011 hingga 2018. Selain itu, penambahan jumlah hotel juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD sektor pariwisata di kabupaten/kota wilayah DIY dalam periode yang sama. (Novandre, 2019, pp.69-72). Temuan menarik lainnya adalah bahwa pendapatan per kapita juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD sektor pariwisata di kabupaten/kota wilayah DIY dari tahun 2011 - 2018.

Nusa dan Khoirudin (2020) menemukan bahwa kenaikan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan subsektor pariwisata DIY pada 2012-2017. Jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan PAD subsektor pariwisata (Nusa & Khoirudin, 2020, pp.7-11). Perbedaan terjadi pada temuan Nusa dan Khoirudin (2020), yakni jumlah objek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan PAD subsektor pariwisata DIY 2012-2017. Selain itu, jumlah biro perjalanan wisata juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan PAD dalam subsektor pariwisata DIY pada periode 2012-2017 dikarenakan keberadaannya masih terbatas di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (Nusa & Khoirudin, 2020, pp.7-11).

Menurut penelitian Nusa dan Khoirudin (2020), terdapat hubungan signifikan antara peningkatan jumlah wisatawan dan pertumbuhan subsektor pariwisata DIY pada periode 2012-2017. Mereka juga menemukan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam subsektor pariwisata. Namun, penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dalam temuan bahwa jumlah objek wisata tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD dalam subsektor pariwisata DIY pada periode yang sama. Selain itu, jumlah biro perjalanan wisata juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan PAD dalam subsektor pariwisata DIY pada periode 2012-2017 dikarenakan keberadaannya masih terbatas di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Pemerintah DIY sendiri melalui RPJMD 2017-2022 berupaya meningkatkan geliat turisme massal dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, Kawasan Industri Sentolo, Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA), dan rekayasa sosial untuk mengubah tatanan masyarakat agraris (Aryanto, 2018, pp.39-45). RPJMD DIY 2017-2022 sendiri memiliki empat tematik, yakni Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan, Penurunan Ketimpangan Wilayah, Dukungan Pembangunan *New Yogyakarta Internasional Airport*, dan Pembiayaan Pembangunan.

Beberapa prioritas program yang muncul berdasar RPJMD DIY 2017-2022 adalah pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Pelabuhan Tanjung Adikarto, NYIA, akses bandara, *underpass* Gejayan-Monjali-Kentungan, pemberdayaan kawasan pesisir dan desa wisata, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif Program Keluarga Harapan (UEF PKH) Graduasi oleh Dinas Sosial, serta pengembangan UMKM (Wahyuningsih, 2019). Kajian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan warga terhadap bantuan program pemerintah menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan pariwisata di DIY. Persepsi warga yang nyaman menjadi buruh dan enggan membuat usaha, serta nyaman menerima bantuan, menjadi kendala pembangunan di DIY.

Geliat turisme massal di DIY kenyataannya tidak lantas mengatasi permasalahan kesejahteraan yang ada. Studi yang dilakukan oleh Adhitya, *et al.* (2020) menggunakan data panel DIY pada 2007-2018, menemukan bahwa variabel pariwisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kajian tersebut menjelaskan bahwa pariwisata di DIY berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan (Adhitya *et al.*, 2020).

Kajian yang dilakukan oleh Kamim, Amal, & Khandiq (2018) menunjukkan bahwa upaya perubahan sosial secara terencana yang dilakukan Pemda DIY melalui RPJMD DIY 2017-2022 belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan justru memunculkan masalah baru. Upaya rekayasa sosial untuk mengubah tatanan masyarakat agraris untuk mendukung wisata bahari tidak berjalan dengan baik, disebabkan dominasi nelayan pendatang dalam penangkapan ikan, kondisi geografis, dan warga yang menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan utama (Kamim *et al.*, 2018).

Kamim (2019) di lain sisi menjelaskan bahwa megaprojek turisme massal di pesisir selatan DIY telah mendorong munculnya fenomena *ocean grabbing* yang ditandai dengan peminggiran pengetahuan lokal, upaya pemerintah mengubah fungsi ruang secara sepihak untuk kepentingan investor melalui alokasi dan kontrol, serta pemetaan ulang peruntukan wilayah untuk menggenjot wisata. Ketiga fitur tersebut telah menyebabkan terpinggirkannya mata pencaharian masyarakat petani pesisir selatan DIY dan kerusakan alam, akibat rekayasa sosial serta teknologi (Kamim, 2019).

Kajian lain yang dilakukan oleh Riadi (2018) menunjukkan bahwa turisme massal membawa dampak negatif berupa konsentrasi modal oleh para pengusaha hotel atau penginapan di Prawirotaman melalui proses pewarisan oleh warga lokal yang dulunya memiliki usaha batik. Investor pendatang melakukan akumulasi modal di Prawirotaman dengan jalan lain melalui jejaring sosial untuk memasarkan jasa atau produk dan memperoleh lokasi yang tepat untuk berusaha. Masifnya pembangunan hotel di Prawirotaman membawa dampak ketimpangan sosial dan geografis yang dirasakan warga lokal (Riadi, 2018, pp.29-33). Studi Widiyanto & Keban (2020) juga menunjukkan masifnya pembangunan hotel dalam

konteks sekitar Malioboro menunjukkan masalah gentrifikasi berupa naiknya harga tanah, kesulitan mencari pekerjaan bagi warga lokal, dan mahalanya properti (Widianto & T.Keban, 2020).

Kajian ini akan melengkapi studi-studi sebelumnya dan bertujuan untuk menggali proses ekonomi-politik secara historis, fenomena pergeseran pariwisata yang awalnya didorong oleh warga DIY menjadi berorientasi pada turisme massal. Manfaat yang didapat dari proses pelacakan tersebut adalah untuk menelaah titik balik penghidupan warga DIY yang justru terpinggirkan oleh geliat turisme massal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah “Bagaimana pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY?”

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Kajian ini dibingkai menggunakan sudut pandang *authoritarian neoliberalism* yang mengacu pada upaya negara dalam menopang perkembangan ekonomi melalui sejumlah kebijakan represif dan memberatkan warga negara. Bruff (2014) menghubungkan gagasan Hall dan Poulantzas mengenai *authoritarian statism/populism* untuk menjelaskan fenomena penundukan oposisi politik dengan alasan mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan semakin luasnya penggunaan instrumen non-demokratis dalam menopang pertumbuhan ekonomi (Bruff, 2014).

Proyek neoliberalisme telah bergantung pada peran dari aparat negara untuk menggunakan kekuatan pemaksa untuk memperkuat legitimasi dan melindungi diri. Bruff dan Tansel (2018) melihat tumbuhnya *authoritarian neoliberalism* terjadi pada salah satu dari dua kondisi, yakni reformasi pasar kondisi pasca-krisis dan liberalisasi ekonomi secara historis yang tidak merata pada satuan wilayah dan level kekuasaan tertentu. Pada kondisi pertama, *authoritarian neoliberalism* dalam bentuk konfigurasi dari proses reformasi pasar dan kekuasaan otoriter (Bruff & Tansel, 2018). Kondisi kedua terjadi baik di negara otoriter dan negara demokratis, untuk melindungi akumulasi modal.

Clua-Losada dan Ribera-Almandoz (2017) melihat dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan di Spanyol menunjukkan adanya dampak *authoritarian neoliberalism* menimbulkan apa yang disebut Poulantzas (1978) sebagai efek isolasi. Efek isolasi mengacu pada pengerdilan masalah yang dihadapi warga negara, bukan sebagai masalah publik, melainkan hanya dianggap sebagai persoalan individu. *Authoritarian neoliberalism* dalam kasus kebijakan ketenagakerjaan di Spanyol telah membuat personalisasi hukum perburuhan, sehingga melemahkan upaya kolektif untuk memengaruhi kebijakan. Faktor eksternal yang memengaruhi tumbuhnya *authoritarian neoliberalism* di Spanyol adalah kuatnya pengaruh lembaga keuangan global seperti IMF (*International Monetary Fund*) dalam mendorong perubahan kebijakan proakumulasi modal (Clua-Losada & Ribera-Almandoz, 2017).

Tansel (2018) melihat kasus di Turki juga melihat faktor eksternal yang sama dalam mendorong tumbuhnya *authoritarian neoliberalism*. Preskripsi dari IMF dalam reformasi pasar juga mendorong pemerintah Turki untuk melakukan komodifikasi ruang perkotaan, demi kepentingan perkembangan ekonomi (Tansel, 2018). Preskripsi dari IMF membuat pembiayaan negara terhadap sektor publik semakin berkurang. Hal tersebut diikuti oleh faktor internal berupa resentralisasi pasca-kekuasaan AKP di Turki. Resentralisasi membuat adanya kecenderungan penggunaan pendekatan *top down* dan pembungkaman partisipasi warga dalam kebijakan ekonomi yang berdampak pada kehidupan mereka.

Authoritarian neoliberalism tidak selalu efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi seperti dalam kasus di Afrika. Kasus Afrika yang digali oleh Harrison (2018)

menunjukkan bahwa cara *top down* dan dukungan politik kuat dari negara tidak selalu mendorong pertumbuhan dan akumulasi modal. Otoritarianisme yang sudah mengakar kuat di Afrika justru tidak mampu mendukung reformasi pasar disebabkan adanya ketidakstabilan politik dan buruknya akuntabilitas. Masih kuatnya campur tangan negara dalam sektor ekonomi juga membuat proses liberalisasi tidak berjalan secara utuh (Harrison, 2018). Campur tangan negara di sektor ekonomi sendiri dipenuhi oleh perilaku renten dari pejabat politik yang semakin menambah parah kondisi.

Gallo (2021) lebih lanjut berdasarkan studinya di Italia, Hungaria, dan Kazakhstan melakukan klasifikasi tiga bentuk *authoritarian neoliberalism*, yakni *technocracy*, *populist nationalism*, dan *traditional authoritarianism*. *Technocracy* mengacu pada kuatnya peran dari para pakar dan teknokrat dalam memasukkan agenda *neoliberal* ke dalam kebijakan yang dibuat oleh negara. Para teknokrat sering kali merupakan agen lembaga transnasional yang bertindak mengamankan pasar global. Keahlian menjadi instrumen penting depolitisasi dan memberikan jalan bagi kebijakan pro pasar.

Varian *populist nationalism* mengacu pada pertemuan antara kepentingan nasional dan agenda pasar global yang ada di dalam kebijakan negara. Pemerintah yang memiliki corak *authoritarian neoliberalism* tersebut akan membingkai dalil “kepentingan umum” dan “kebutuhan publik” untuk menunjang setiap kebijakan pro pasar global (Gallo, 2021). Imajinasi kepentingan nasional dan kebijakan pro pasar sendiri dapat bersatu disebabkan kesamaan kebutuhan akan “stabilitas sosial” yang harus dijamin.

Varian *traditional authoritarianism* terjadi dalam bentuk kapitalisme negara akibat demokrasi tidak mampu menyelesaikan masalah yang dimunculkan oleh neoliberalisme. Masalah struktural membuat para pemodal yang juga elite politik untuk melindungi negara dari terpaan kondisi pasar global. Kelas penguasa dalam corak *traditional authoritarianism* bukan berarti anti kepentingan pasar global, melainkan mengedepankan kepentingan kroninya terlebih dahulu, yang ada di dalam perekonomian nasional.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, kajian ini akan menggunakan ketiga kombinasi model *authoritarian neoliberalism* yang disusun Gallo (2021) untuk membaca gencarnya turisme massal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tak dapat dilepaskan dari peran teknokrasi, kepentingan kelas penguasa dan penggunaan instrumen kekuatan represif untuk mengoneksikan kepentingan pasar global dan nasional. Kasus turisme massal di DIY akan membawa kebaruan untuk menunjukkan bahwa corak rezim *authoritarian neoliberalism* justru menjadi pembentuk pasar wisata itu sendiri yang ditopang oleh dukungan kuat dari pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teknik studi kasus dengan fokus pendalaman fenomena turisme massal di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai “satu kesatuan ruang kehidupan.” Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada April-September 2018 terhadap berbagai pemangku kepentingan, yakni Bappeda DIY, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Fraksi PKS DPRD DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY, Fraksi PAN DPRD DIY, Perkumpulan IDEA, IRE Yogyakarta, Walhi Yogyakarta, PSKK UGM, beberapa akademisi kampus yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk mendalami logika pembangunan turisme massal di DIY. Observasi di sepanjang pantai Kabupaten Bantul-Tapak Bandara YIA, Kabupaten Kulonprogo dilakukan pada 14-15 Juli 2018 dan sepanjang pantai Baron-pelabuhan perikanan Sadeng, Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada 16-17 Agustus 2018 untuk mendalami kondisi masyarakat pesisir yang terdampak langsung megaproyek turisme massal. Penelusuran data dilakukan

pula melalui telaah atas laporan pemerintahan, pemberitaan media, artikel jurnal, laporan penelitian, film dokumenter, dan laporan lembaga swadaya masyarakat untuk melihat kondisi turisme massal DIY sampai tahun 2020. Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan sejak perencanaan studi hingga penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Turisme Massal Muncul dari Rahim Negara (1980-an sampai 2017)

Pariwisata telah tumbuh dari inisiatif masyarakat perkotaan DIY pada 1970-an sampai 1990-an (Dahles, 2018). Konsentrasi bisnis pariwisata masyarakat terdapat di Sosrowijayan dan Prawirotaman, sedangkan Kotagede menjadi lokasi industri kerajinan perak yang terkenal. Sosrowijayan menjadi kawasan permukiman murah yang memfasilitasi akomodasi para *backpacker* dari berbagai negara sejak tahun 1970-an. Prawirotaman sendiri awalnya adalah permukiman keluarga abdi dalem dan prajurit Keraton yang memiliki usaha batik tulis dan merenovasi rumahnya untuk menampung turis saat ekonomi kerajinan menjadi lesu.

Upaya pemerintah untuk mengembangkan hotel bertaraf internasional dimulai dengan pembukaan Ambarrukmo Palace Hotel pada tahun 1966 dengan 150 kamar dan fasilitas pendingin ruangan (Bank Indonesia Institute, 2020). Hotel kelas dua dari era Hindia Belanda, yakni Hotel Garuda dan Hotel Merdeka, juga melayani turis asing. Sejak akhir tahun 1980-an, melemahnya kontribusi sektor industri telah memicu pelemahan ekonomi di DIY secara makro dan dibutuhkan bidang kegiatan ekonomi lain yang harus dikerjakan. Ambruknya industri gula pada akhir tahun 1980-an telah memicu deindustrialisasi akut di DIY (Bank Indonesia Institute, 2020).

Sejak diberlakukannya kebijakan deregulasi pada tahun 1980-an, pariwisata DIY mengalami pergeseran menjadi pola turisme massal. Perkembangan sektor pariwisata yang pesat telah mendorong peningkatan jumlah hotel secara signifikan. Dalam rentang waktu 1988-1992, jumlah hotel meningkat dari 11 menjadi 15, sementara jumlah total kamar naik dari 923 menjadi 1.511 (Bank Indonesia Institute, 2020). Tepat pada tahun 1992, Yogyakarta merayakan kehadiran hotel bintang lima pertamanya, dan jumlah hotel bintang empat juga bertambah dari dua menjadi tiga. Menariknya, pada awalnya tidak ada hotel maupun losmen yang berbentuk CV, PT, maupun firma pada pertengahan tahun 1980-an. Pada saat itu, sekitar 97% hotel dimiliki oleh perseorangan, menunjukkan dominasi pemilik tunggal dalam industri perhotelan DIY. (Bank Indonesia Institute, 2020).

Pemerintahan Orde Baru memanfaatkan turisme massal untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri yang digambarkan sebagai rezim kekerasan. Yogyakarta dilirik oleh rezim Orde Baru sebagai wilayah pengembangan turisme massal setelah Bali. Pariwisata semakin dilirik menjadi sumber pendapatan di tengah penurunan devisa dari bahan bakar fosil. Pengembangan turisme massal bersifat *top down* dengan bias untuk menggenjot kedatangan turis asing melalui pembangunan skala besar (Hampton, 2003).

Rezim Orde Baru melakukan intervensi pula dalam hal perizinan, pelatihan, pemasaran sampai dengan pengaturan layanan pemandu wisata. Lisensi menjadi patokan penting untuk mengatur siapa yang boleh beroperasi memberikan layanan pemandu wisata (Dahles, 2002). Hal tersebut menunjukkan kuatnya corak kekuatan represif dari negara, ketika ketiadaan lisensi dapat dianggap merusak legitimasi yang dibangun melalui kontrol kuat. Negara juga membentuk Himpunan Duta Wisata Indonesia yang berganti menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk mengatur keanggotaan pemandu wisata.

Siapa yang ingin menjadi pemandu mau tidak mau menjadi anggota HPI disebabkan biro perjalanan mewajibkan keanggotaan sebelum mempekerjakan mereka. HPI tidak menjadi selayaknya serikat pekerja yang memperjuangkan nasib anggota, selain karena kontrol kuat dari negara. Anggota juga harus berjibaku sendiri untuk mencari biro perjalanan yang bersedia mempekerjakan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan industri, termasuk di sektor wisata, berjalan timpang di masa Orde Baru (Dahles, 2002).

Rezim Orde Baru memberi penekanan pada pengembangan pariwisata bagi turis dari kelas menengah atas melalui pembangunan *resort*. Rezim menganggap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi informal sebagai penghambat ambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Langkah represif diambil negara untuk “menertibkan” pedagang asongan, tukang becak, pedagang kaki lima (PKL), dan bentuk ekonomi informal lainnya. Langkah tersebut tak efektif disebabkan ekonomi formal tak mampu menyerap angkatan kerja (Dahles & Prabawa, 2013).

Pemerintah melakukan strategi pemasaran dengan membangun citra Yogyakarta sebagai “jantung kebudayaan Jawa” (Dahles & Prabawa, 2013). Strategi pemasaran tersebut muncul dari anggapan bahwa Yogyakarta adalah kota budaya yang penuh keberagaman, yang di dalamnya memiliki warisan khazanah Jawa mulai dari kesenian sampai kerajinan tangan. Ketiadaan infrastruktur pendukung industrialisasi yang memadai di Yogyakarta memunculkan anggapan mengenai potensi ekonomi dari warisan budaya Jawa. Pemerintah juga berambisi menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pariwisata kebudayaan Indonesia dengan adanya cagar budaya Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Kraton (Dahles & Bras, 1999).

Perkembangan sampai tahun 1990-an, kenyataannya ada dua bentuk turisme yang berkembang di DIY, yakni pariwisata bagi kalangan atas terletak di jalan utama dan pengelolaan wisata kecil berbasis kampung perkotaan (Dahles & Prabawa, 2013). Harapan untuk memacu kedatangan turis kelas menengah atas sendiri tak tercapai disebabkan sebagian besar dari wisatawan asing adalah pelancong dengan anggaran terbatas (Sörensson, 2008). Yogyakarta kenyataannya tetap bergantung pada ekonomi dari sumbangsih UMKM, meskipun bisnis hotel dan *mall* mulai berkembang pesat.

Pada tahun 1993, hampir secara keseluruhan (lebih dari 99,8%) industri DIY didominasi oleh sektor usaha kecil yang terutama berfokus pada kerajinan dan kebutuhan rumah tangga. Merosotnya harga olahan minyak bumi sejak pertengahan tahun 1980-an juga mendorong pemerintah pusat mendorong diversifikasi ekonomi, memfasilitasi privatisasi, dan mengurangi pengeluaran negara termasuk anggaran pengentasan kemiskinan (Bank Indonesia Institute, 2020). Hal tersebut telah memicu pertumbuhan sektor tersier dalam memberikan sumbangsih pada perekonomian DIY sebagaimana digambarkan pada Tabel 1. Pada tahun 1991 saja, bidang jasa memiliki sumbangsih sebesar 29,32% dari total sektor tersier, diikuti oleh bidang perdagangan dan hankam (Bank Indonesia Institute, 2020).

Tabel 1. Peranan Kelompok Sektoral PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1984-1991

Sektor	Tahun							
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Pertanian	30,92	26,84	29,23	29,54	30,99	30,02	29,46	27,65
Manufaktur	13,91	15,01	14,69	16,1	15,77	15,95	16,24	17,53
Tersier	55,17	58,15	56,08	54,36	53,24	54,04	54,3	54,82

Sumber: Bank Indonesia Institute, 2020.

Akhir tahun 1990-an, ekonomi turisme massal di DIY mulai terguncang. Kebakaran hutan tahun 1996 di Kalimantan Timur dan Sumatera berdampak pada penurunan jumlah

wisatawan asing (Dahles & Susilowati, 2015). Ketidakstabilan ekonomi dan politik pasca-krisis 1998, menyebabkan terjadinya penurunan jumlah wisatawan asing di DIY. Jumlah pengunjung yang menginap di hotel berbintang lebih besar dibandingkan pada hotel tak berbintang. Wisatawan yang kaya pada dasarnya memperhatikan aspek keamanan, sehingga penurunan jumlah turis lebih parah dibandingkan di Bali. Hal tersebut terutama karena terjadinya demonstrasi massa di Yogyakarta (Suparwoko, 2012).

4.2. Turisme Bangkit dari Krisis (1998-2017)

Pasca-krisis 1998, pemerintah daerah gencar mengembangkan proyek turisme massal terutama dengan memanfaatkan kondisi alam. Masalah lingkungan dan degradasi sosial harus dirasakan masyarakat sebagai akibat dari proyek turisme massal tersebut, misalnya dalam wisata Taman Nasional Gunung Merapi (TMGM). Pemda mengklaim bahwa kekayaan flora dan fauna TMGM dapat menjadi daya tarik wisata dan tak akan rusak. Kekhawatiran muncul dari masyarakat yang tidak ingin mata pencaharian dan sumber airnya terancam. Kalangan DPRD Sleman sendiri yang saat itu menyatakan tidak memiliki gambaran lengkap mengenai proyek tersebut. Pemda sendiri kesulitan untuk menjelaskan rancangan proyek kepada masyarakat (Suparwoko, 2012).

Terjadinya Bom Bali tahun 2002 dan 2005 kembali berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan asing ke DIY (Dahles & Susilowati, 2015). Dampak yang ditimbulkan oleh wabah SARS tahun 2003 dan gempa bumi di DIY tahun 2006 ternyata juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan dari luar negeri (Dahles & Susilowati, 2015). Krisis menyebabkan pengelola pariwisata skala kecil di Sosrowijayan dan Prawirotaman sulit bertahan. Pemilik losmen mulai mencoba memberikan diskon kepada wisatawan domestik. Beberapa pemilik losmen ada yang harus menutup usaha sampingan, mengurangi staf ataupun kembali mencari pekerjaan sampingan. Beberapa kembali ke bisnis kos untuk bertahan hidup karena banyak terdapat perguruan tinggi di Yogyakarta yang menarik kedatangan mahasiswa.

Krisis memicu pemerintah untuk fokus pada pasar pariwisata domestik. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dipandang sebagai potensi pariwisata domestik. Peralihan ke pasar domestik diikuti dengan pembuatan kebijakan hari libur untuk memberikan waktu luang bagi warga negara berwisata. Pemerintah pusat melakukan promosi intensif pada tahun 1997 dan diikuti peningkatan jumlah hari libur nasional pasca Bom Bali I pada 2002. Langkah tersebut berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Peningkatan pemesanan akomodasi wisatawan domestik justru meningkat (Dahles, 2018).

Satu dekade setelah krisis, lingkungan sekitar mengalami transformasi radikal seiring perkembangan hotel dan restoran yang didorong oleh datangnya investor dari luar dan mengubah karakter ekonomi lokal. Kotagede masih menanggung dampak akibat bencana disebabkan banyak bangunan hancur belum diperbaiki dan gerai-gerai perak tidak dibangun kembali. Pengrajin memilih menyerah pada kegiatan perdagangan atau memilih merelokasi kegiatan produksi ke perdesaan miskin di sebelah timur Yogyakarta, tempat sebagian besar pekerja kontrak mereka tinggal (Dahles, 2018).

Menurut Suharyanto *et.al.*, (2021) perkembangan bisnis properti telah berkembang pesat di Prawirotaman dengan adanya 89 hotel, 58 kafe dan restoran sampai dengan saat ini. Sebagian besar kafe dan bar menjual alkohol dan menjadikan citra Prawirotaman sebagai "Legian ala Yogyakarta." Beberapa hotel juga menawarkan alkohol dan hiburan malam, sehingga mengundang penduduk non-turis untuk ikut menikmati layanan. Tidak semua warga mewajarkan perkembangan ekonomi kelas atas di Prawirotaman sebagai akibat dari kebisingan yang muncul akibat hiburan malam. Pembangunan hotel sendiri juga

menimbulkan kekhawatiran munculnya kelangkaan air disebabkan menggunakan air tanah. Lalu lintas terganggu pula akibat akses parkir yang meluas secara ilegal (Suharyanto *et al.*, 2021).

Kekhawatiran munculnya kelangkaan air akibat ekspansi hotel bukan isapan jempol semata. Beberapa hotel, *mall*, apartemen, dan restoran sendiri memilih menggunakan air tanah disebabkan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan suplai dari PDAM. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta yang mengatur bahwa usaha skala besar harus berlangganan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air (Yusuf & Purwandani, 2020). Kajian Manifesty (2019) menunjukkan bahwa dari 418 hotel di Kota Yogyakarta, hanya 156 hotel sampai Januari 2018 yang memanfaatkan layanan air PDAM Tirtamarta. PDAM pun sebenarnya juga memanfaatkan air tanah. Permintaan air tanah dangkal oleh pihak hotel lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi oleh rumah tangga penduduk. Akibatnya akses penduduk terhadap air tanah semakin sulit (Manifesty, 2019).

Pemerintah daerah sendiri atas desakan masyarakat sipil mulai mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan hotel, misalnya di Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013. Regulasi tersebut mengatur penghentian pemberian izin pembangunan hotel sejak dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Kenyataannya kebijakan moratorium tidak efektif disebabkan permintaan pengurusan izin hotel membludak pada tahun 2013. Hal tersebut terbukti dengan adanya permohonan izin sebanyak 101 pada Oktober sampai Desember 2013 (Sesanti, 2016).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan kebijakan moratorium melalui Peraturan Bupati Sleman No. 63 Tahun 2015 dan perubahannya No. 6 Tahun 2016, yang menghentikan sementara izin hotel apartemen dan kondotel di wilayah tersebut, kebijakan ini masih memberikan peluang bagi ekspansi hotel. Hal ini disebabkan oleh adanya celah di mana permohonan perizinan dapat diproses sebelum moratorium diberlakukan, baik untuk pengurusan izin baru maupun perpanjangan operasional usaha. Dengan demikian, kebijakan moratorium ini tidak sepenuhnya menghentikan pertumbuhan industri hotel di Kabupaten Sleman. (Ulumuddin & Darwin, 2021). LBH Yogyakarta menemukan masalah berupa minimnya sosialisasi dan pelibatan warga terdampak dalam pengurusan perizinan perhotelan di Kota Yogyakarta. Persetujuan warga sebenarnya sangat penting dalam mengontrol faktor eksternal negatif yang muncul dari pembangunan hotel (LBH Yogyakarta, 2013).

Ambisi untuk menggenjot proyek turisme massal menunjukkan bahwa ekspansi kapital adalah proyek ideologis dari negara yang didukung dengan seperangkat kekerasan budaya maupun teknis. Upaya untuk mengedepankan turisme massal menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan logika pasar untuk memenuhi penghidupan warganya (Juego, 2018). Hal tersebut menunjukkan paradoks dari *authoritarian neoliberalism* yang berkembang sejak masa Orba dalam konteks pembangunan pariwisata di DIY. Dalam hal ini negara memiliki kesan otoriter dan kebijakan pro pasar bebas.

Ada dua motif yang muncul dari bekerjanya pola rezim *authoritarian neoliberalism* dalam pengembangan turisme massal DIY, yakni menciptakan iklim bisnis yang kuat bagi eksistensi pasar dan menjaga hubungan antar-kelas di dalam mekanisme pasar. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kondisi DIY nyaman untuk pengembangan ekspansi turisme massal. Peran pemerintah untuk mengintervensi kondisi ekonomi turisme massa dalam kondisi pasca-krisis menunjukkan upaya negara untuk menyelamatkan kegagalan pasar. Upaya intervensi pemerintah untuk menangani kegagalan pasar sebenarnya sudah menunjukkan kerentanan dari ekonomi berbasis turisme massal itu sendiri, sehingga terkesan dipaksakan (Juego, 2018).

Fleksibilitas pasar tenaga kerja bahkan sengaja diciptakan untuk mendukung ketahanan ekonomi turisme massal, meskipun berdampak buruk terhadap penghidupan buruh (Juego, 2018). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan LBH Yogyakarta pada tahun 2013 yang menemukan adanya pelanggaran hak-hak buruh sebagai akibat dari negara yang enggan peduli dengan nasib buruh. Negara menganggap yang paling penting lapangan pekerjaan terbuka luas, sedangkan jaminan penghidupan layak bagi buruh kurang diperhatikan. Hal tersebut tak dapat dilepaskan dari kondisi DIY yang bukan daerah industri membuat persoalan perburuhan tidak terlalu kompleks dan kesadaran buruh belum tumbuh mengingat kondisi ekonomi dari turisme massal sendiri terbilang rentan (LBH Yogyakarta, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2018, dengan menggunakan data dari tahun 2004 hingga 2015, menunjukkan bahwa sebesar 28,3% pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh aglomerasi industri, angkatan kerja, dan upah. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi di DIY adalah adanya aglomerasi industri yang lemah, dikarenakan perbedaan karakter geografis dan ekonomi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Ketergantungan ekonomi pada UMKM itulah yang menyebabkan majikan tidak dapat memenuhi kebutuhan buruh dengan layak dan sering berujung menjadi konflik hubungan industri (Nugraha, 2018).

Belum kuatnya gerakan buruh di DIY menjadi persoalan sendiri. Menurut Hernawan dan Dewi (2013) sampai tahun 2012 masih terdapat 50% perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja. Pemberangusan serikat pekerja di DIY sengaja dilakukan melalui langkah mempersulit pembentukan organisasi, mutasi atau skorsing, bahkan pemutusan hubungan kerja pengurus sampai dengan membentuk wadah tandingan. Serikat Pekerja di DIY sendiri mencoba menghadapi pembungkaman melalui pendampingan hukum dan penyadaran anggota (Hernawan & Dewi, 2012).

Pemerintah daerah dan pusat mengambil opsi untuk memperluas turisme massal di wilayah selatan DIY. Hal tersebut diklaim untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial sebagai akibat dari ekonomi yang lebih banyak berkembang di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pemerintah pusat melalui megaprojek *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*, sejak tahun 2011 gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perluasan turisme massal. Prioritas utama untuk mendukung pengembangan destinasi Borobudur-Yogya melalui pembangunan bandara skala internasional di Kulon Progo (LBH Yogyakarta, 2013). RPJMD DIY 2017-2022 kemudian menjadi momentum penting untuk memperluas upaya dalam menggenjot turisme massal yang didorong oleh pemerintah pusat dan daerah.

4.3. RPJMD DIY 2017-2022 sebagai Instrumen Untuk Memperluas Turisme Massal (2017-sekarang)

Pemerintah DIY melalui RPJMD DIY 2017-2022 berupaya menjadikan wilayah pesisir selatan untuk pengembangan turisme yang dimulai dengan penyediaan berbagai infrastruktur penopang seperti JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan), NYIA (*New Yogyakarta International Airport*), jalan tol, dan proyek lainnya. Pemda DIY mengklaim bahwa berbagai megaprojek infrastruktur yang ada akan membangun konektivitas ke objek wisata di wilayah pesisir selatan. Pemerintah DIY juga berupaya menggunakan sudut pandang pembangunan yang didorong pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan “pembangunan dari pinggiran.”

Pemerintah DIY dalam RPJMD DIY 2017-2022 kemudian menafsirkan logika pembangunan tersebut untuk mengembangkan perekonomian di wilayah yang memiliki problem kesenjangan sosial. Proyek infrastruktur yang dimasukkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 tak dapat dilepaskan pula dari amanat pemerintah pusat untuk menyokong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

".....DIY harus dikembangkan menjadi bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional. Kita harus menyokong Borobudur, meskipun Borobudur ada di Jawa Tengah. Kita harus menyokong, kemudian itu memunculkan ada proyek strategis NYIA itu salah satunya, ada proyek JJLS, ada jalan tol...."(Hasil Wawancara dengan Staf dan Kabid Perencanaan Bappeda DIY pada 26 April 2018).

DIY sendiri melalui MP3EI sudah ditetapkan koridor ekonomi bisnis *Meeting, Incentives, Convergence and Exhibition* (MICE) sebagai bagian dari pengembangan turisme massal. Perda DIY No. 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 mengukuhkan pengembangan bisnis MICE (LBH Yogyakarta, 2016). Pemerintah pusat melalui RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 berambisi untuk meningkatkan lama tinggal dan tingkat pengeluaran wisatawan melalui pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadikan Kawasan Borobudur sebagai bagian dari proyek yang disebut 10 "Bali Baru" (LBH Yogyakarta, 2020)." RPJMD DIY 2017-2022 menjadi bentuk eksekusi dari pelaksanaan perencanaan periode sebelumnya sekaligus penerjemahan dari visi politik Gubernur dan sinkronisasi program-program turisme massal yang didorong pemerintah pusat.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kemudian dikeluarkan pemerintah pusat untuk menyiapkan DIY dan wilayah sekitarnya dalam menopang KSPN Borobudur. Terdapat empat megaprojek penting penopang turisme massal di DIY dan sekitarnya yang didorong oleh pemerintah pusat. *Pertama*, YIA di Kabupaten Kulon Progo yang disiapkan menjadi pintu masuk turis ke wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya.

Kedua, Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo serta Bendungan Pasuruhan, Kabupaten Magelang disiapkan sebagai infrastruktur penyediaan air bersih untuk menopang turisme massal. *Ketiga*, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di Dusun Winong, Kabupaten Cilacap. *Terakhir*, proyek tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, dan tol penghubung ke YIA. Suplai bahan material proyek tersebut didapatkan melalui pembangunan pabrik semen di Desa Sikayu, Desa Ngorako dan Desa Banyumudal di Gombang, Kabupaten Kebumen; tambang pasir besi Kabupaten Kulon Progo; serta tambang pasir di lereng Gunung Merapi dan Sungai Progo (LBH Yogyakarta, 2020).

Proyek pendukung pengembangan turisme massal di DIY sendiri kemudian mendapatkan perlawanan dari warga terdampak. LBH Yogyakarta menjadi pendamping hukum warga terdampak proyek penopang KSPN Borobudur di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan DIY. Bahkan, sejak penetapan proyek tambang pasir besi Kulon Progo sebagai bagian dari skema MP3EI (LBH Jakarta, 2019; LBH Yogyakarta, 2013, 2016, 2020). Artinya pengembangan turisme massal tidak hanya membawa dampak serius bagi warga DIY, melainkan juga penduduk di wilayah sekitarnya.

Pemda DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 untuk menetapkan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah konstruksi bandara. Warga terdampak pembangunan bandara sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor Perkara 07/G/2015/PTUN YK, menyatakan bahwa Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 dibatalkan disebabkan tak sesuai dengan rencana tata ruang DIY (Bappeda DIY, 2016). Pemda DIY kemudian memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan nomor register 456 K/TUN/2015 menetapkan bahwa izin penetapan lokasi bandara tetap berlaku.

Pemerintah pusat dan Pemda DIY bahkan menggunakan budaya dan acara keagamaan untuk melakukan rekayasa sosial dalam melegitimasi pembangunan bandara YIA. Prosesi peletakan batu pertama konstruksi bandara YIA bahkan disebut dengan nama *"Babat Alas Nawung Krido"*. Presiden Joko Widodo saat prosesi *groundbreaking* pada 27 Januari 2017 mengklaim bahwa terdapat Sabda Leluhur yang diklaim gubahan Ronggowarsito yang menyatakan bahwa wilayah Temon kelak akan menjadi lokasi bandara (Haryanto, 2017). Kutipan sabda leluhur yang dimaksud adalah:

"Sesuk Ning Tlatah Temon Kene Bakal Ono Wong Dodolan Camcao Nang Awang-Awang. Tlatah Temon Kene Bakal Dadi Susuhe Kinjeng Wesi. Tlatah Sak Lor Gunung Lanang Lan Kidul Gunung Jeruk Bakal Dadi Kutho. Glagah Bakal Dadi Mercusuarung Bawono."

Artinya: "kelak di wilayah Temon ini akan ada penjual cincau di udara (baca pesawat udara). Wilayah Temon ini kelak akan menjadi sarangnya capung besi. Kawasan di utara Gunung Lanang dan selatan Gunung Jeruk akan menjadi kota. Glagah akan menjadi mercusuarinya dunia" (Haryanto, 2017).

Anung Tedjowirawan, akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam film dokumenter *Kinjeng Wesi* yang dibuat oleh LBH Yogyakarta mempertanyakan keaslian kutipan Sabda Leluhur. Menurut Anung Tedjowirawan kutipan tersebut bukan karakter dan gaya bahasa dari karya Ronggowarsito. Anung Tedjowirawan mempertanyakan pula dari segi isi bahwa Ronggowarsito sebagai pujangga Surakarta untuk apa membuat "ramalan" mengenai Yogyakarta. Kutipan Sabda Leluhur sendiri juga tidak dijelaskan berasal dari karya Ronggowarsito yang mana, sehingga patut dipertanyakan keasliannya. Kutipan Sabda Leluhur juga tak memiliki candrasengkala yang dapat digunakan untuk mengecek benarkah memang ada ramalan itu terjadi di tahun 2017 (LBH Yogyakarta, 2017). Sri Sultan HB X juga menggunakan budaya sebagai cara untuk mendorong masyarakat mendukung pembangunan bandara. Sri Sultan HB X menggunakan pengalaman pendirian Kerajaan Mataram untuk menggambarkan "transisi ekonomi" melalui turisme massal yang akan didorong di wilayah selatan DIY. Berikut kutipan paparan Sultan HB X:

".... Dahulu, Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Penjawu, dan Ki Juru Martani melakukan 'babat alas' untuk mendirikan Kerajaan Mataram, yang menandai pergeseran peradaban baru dari Kerajaan Pajang yang bercorak maritim ke Kerajaan Mataram yang agraris. Pergeseran peradaban Mataram selanjutnya ditandai 'babat alas' Beringan, yang merupakan cikal bakal Keraton Yogyakarta, yang kemudian menjadi Kota Yogyakarta kini. Momentum abad ke-18 itu sejatinya secara etimologis merupakan ajakan untuk segera membangun peradaban baru...." (Haryanto, 2017).

PT. Angkasa Pura I (AP) menggelar pula pengajian dan doa bersama dengan menghadirkan Emha Ainun Nadjib bersama Kelompok Musik Kiai Kanjeng pada 24 Maret 2017 untuk memobilisasi dukungan elite warga dan membendung penolakan dari

masyarakat terdampak. Acara dikemas dengan tema "*Hijrah: Angon Kahanan Anyar* (Peradaban Baru Pasca Operasional Bandara Internasional Yogyakarta)." Emha Ainun Nadjib mengibaratkan proses pembangunan bandara YIA sebagai hijrah warga terdampak menuju keadaan dan peradaban baru yang lebih baik. Berikut kutipan penjelasan Emha Ainun Nadjib yang ditampilkan oleh pihak penyelenggara:

"..... *Hijrah! Bahwa orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah dan tujuan untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah, mereka itulah adalah mukmin sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keberkahan rezeki, nikmat yang mulia, dan kemenangan di sisi Allah. Semoga hijrah yang dilakukan masyarakat Kulon Progo ini dapat diniatkan karena Allah sehingga memperoleh keberkahan rezeki dan kemenangan di sisi Allah SWT....*"(ap1.co.id, 2017).

Fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan pendekatan budaya versi elite menunjukkan bahwa corak rezim *authoritarian neoliberalism* yang bekerja dalam ekspansi turisme massal di DIY berupaya memanfaatkan klientelisme. Penggunaan bahasa-bahasa kebudayaan menjadi alat bagi rezim untuk memukul setiap penolakan terhadap proyek dengan mencap sebagai tak menghargai budaya. Hal tersebut bermanfaat untuk memobilisasi rakyat yang didudukkan sebagai *kawula* yang harus patuh dengan arahan otoritas sebagai penjaga nilai-nilai kebudayaan. Otoritas seolah-olah ingin menunjukkan bahwa proyek turisme massal adalah milik bersama dan melekat menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan masyarakat. Dengan demikian, kombinasi corak rezim *populist nationalism, technocracy* dan *traditional authoritarianism* memang bekerja dalam ekspansi turisme massal di DIY (Stubbs & Lendvai-Bainton, 2019).

Pemerintah juga tak segan untuk menggunakan cara represif untuk memuluskan proyek YIA sebagai pintu masuk perluasan turisme massal. Warga penolak bandara mengaku menerima intimidasi sejak 27-30 November 2017, padahal puncak pengosongan lahan adalah 4 Desember 2017 (mongabay.co.id, 2017b, 2017a). Warga mengaku disakiti secara fisik, rumahnya dirusak, tanaman mereka dimatikan, meteran listrik dicabut oleh pihak pemerintah pada 27-30 November 2017. Pihak AP menekan warga dengan dalih nilai tanah dan rumah sudah diputuskan di pengadilan, padahal warga tidak pernah menyerahkan bukti hak atas tanah, pengukuran dan penilaian lahan tak dilakukan, serta warga tak pernah terlibat dalam negosiasi penjualan (balairungpress.com, 2017; tirto.id, 2017c, 2017b, 2017a).

Aparat melakukan represi kembali pada 5 Desember 2017 dan berujung pada penangkapan 12 pegiat jaringan solidaritas masyarakat sipil yang dianggap sebagai provokator (cnnindonesia.com, 2017). Kekerasan terjadi kembali pada 9 Januari 2018 dan meletus menjadi bentrokan setelah salah satu aparat mengacungkan jari tengah ke arah warga; aparat bahkan ada yang menonjok atau menjambak dan menyeret relawan serta menginjaknya dengan sepatu. Tiga relawan ditangkap oleh aparat pada 9 Januari 2018 (cnnindonesia.com, 2018; lpmrhetero.com, 2018). Kekerasan yang dilakukan aparat kembali terjadi pada 8 Juli 2018 (merdeka.com, 2018). Kekerasan aparat kembali terjadi pada 19-20 Juli 2018 (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), 2018).

Dewi dan Salim (2020) menemukan bahwa pematokan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan YIA dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah. Sosialisasi informal hanya dilakukan AP untuk memberikan pengertian bahwa pematokan dilakukan pada batas terluar rencana bandara. AP berjanji menyediakan lahan pengganti seluas 1.157.374 m² bagi tanah kas desa, jalan, makam, barang milik daerah dan fasilitas umum lainnya. Namun kenyataannya dalam dokumen perencanaan ganti rugi hanya berbentuk uang (Dewi & Salim, 2020, pp.75-122).

Sosialisasi sendiri hanya dilakukan kepada “pihak yang berhak” dan undangan menjadi alat untuk membatasi partisipasi publik. Aparat sendiri sebenarnya kesulitan menjelaskan rencana proyek dan hanya berujung penyampaian aspek administratif semata saat konsultasi publik dilakukan. Penilaian nilai ganti kerugian memang mencapai tiga kali lipat dari anggaran yang ada, tetapi tidak lantas mampu memberikan warga luasan tanah yang sama akibat fluktuasi pasar tanah. Pemda Kulon Progo hanya menyediakan lokasi untuk pemindahan secara mandiri. Namun, warga terdampak harus merogoh kantongnya sendiri untuk membeli lahan (Dewi & Salim, 2020).

Warga yang tak mampu membeli lahan dan membangun rumah, akhirnya memilih tinggal di kontrakan maupun rusunawa di Triharjo, Wates (solopos.com, 2018). Warga yang pindah ke relokasi pun tak mampu membeli lahan untuk menyambung hidup, sehingga banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan baru dan penghidupan tetap (tirto.id, 2018a, 2020). Warga terdampak kenyataannya juga tak lantas dapat memperoleh pekerjaan dari proyek YIA, meskipun pemerintah dan AP mengadakan pelatihan bahasa Inggris, kewirausahaan, las listrik, teknisi mesin AC, tukang batu dan semen. Hal tersebut disebabkan pihak AP sengaja menyerahkan penyerapan pekerja dalam proyek YIA berdasar fleksibilitas pasar tenaga kerja. Berikut kutipan pernyataan Manajer Umum PT Angkasa Pura I Yogyakarta:

“.... yang penting pelatihan ini nanti bisa digunakan oleh mereka. Dan tentu bisa digunakan ketika mulai pembangunan konstruksi bandara.... Kami sudah bekal ketika mereka ingin gabung dengan kontraktor, ya kami sudah bekal. Mereka nanti akan kami rekomendasikan.... Bukan rekomendasi kerja, mereka ikut dalam masa konstruksi pembangunan.... Tergantung seberapa mereka menyiapkan diri.... Ya, jadi pertaruangannya terbuka. Jadi kalau Angkasa Pura I [hanya] berupaya warga di sini kami latih, kami siapkan...”(tirto.id, 2018c).

Pemerintah juga membiarkan fleksibilitas pasar tanah, sehingga terus memperluas praktik spekulasi harga. Para *broker* bermunculan dan mendapat pesanan dari warga luar daerah yang menginginkan lahan di sekitar YIA (tirto.id, 2018b). Apalagi pemerintah berencana mengembangkan kota bandara yang salah satunya terkait pengembangan hotel dan berbagai hunian lain untuk menopang turisme massal. Hal tersebut dapat memperparah kondisi ekspansi hotel yang sudah terjadi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri pada 2 Desember 2019 menyatakan akan mencabut moratorium pembangunan hotel yang sempat diperpanjang sampai 31 Desember 2018 melalui Perwal Nomor 100 Tahun 2017 (tirto.id, 2019a). Izin pendirian akan diberikan pada hotel bintang lima dan empat serta *guest house* (tirto.id, 2019b). Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah hotel berbintang dan tak berbintang selama 2012-2021 terus meningkat di kelima kabupaten DIY. Hal tersebut menunjukkan pemerintah memberikan kemudahan perizinan dalam mendukung turisme massal.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Hotel Berbintang di DIY Tahun 2012-2021

Nama Wilayah	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sleman	20	21	26	26	32	32	49	61	65	65
Bantul	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Kota Yogyakarta	32	39	43	57	55	82	90	98	102	101
Gunungkidul	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Kulon Progo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2022.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Hotel Non-Bintang di DIY Tahun 2012-2021

Nama Wilayah	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sleman	374	379	366	363	354	358	579	649	715	587
Bantul	284	278	248	261	265	251	251	283	384	344
Kota Yogyakarta	374	379	356	362	362	356	490	479	623	536
Gunungkidul	62	61	70	69	69	73	135	199	193	159
Kulon Progo	26	26	27	26	26	24	24	26	36	35

Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2022.

Masalah juga muncul pada para petani tambak yang berada di atas tanah yang diklaim sebagai *Pakualaman Ground*, sehingga pihak Pakualaman mendapat ganti rugi lebih banyak dibandingkan petani tambak (Guild, 2019b, pp.154-167). Hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Keistimewaan 13/2012 yang memberikan wewenang untuk melakukan klaim tanah *Sultan Ground* (SG) dan *Pakualaman Ground* (PAG) berkaitan dengan siapa yang diuntungkan dari proyek turisme massal. Kasus yang hampir sama terjadi dengan keluarnya MoU antara Panitikismo dengan Bupati Gunungkidul pada 21 Juni 2016 mengenai penertiban dan penataan tanah SG di wilayah pantai selatan. Sultan HB X yang hadir dalam penandatanganan MoU menyatakan bahwa banyak penggunaan tanah SG tak sesuai peruntukannya dan menganggap bahwa tak seharusnya sempadan pantai tertutup oleh rumah makan dan bangunan lainnya. Anehnya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) menyatakan bahwa izin pembangunan hotel di wilayah pantai telah dikeluarkan di wilayah Kecamatan Purwosari sampai Tanjungsari (LBH Yogyakarta, 2016).

Sementara itu, proyek tol di DIY dilaksanakan berdasarkan Perpres 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Proyek tol DIY telah masuk dalam PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional dan Perda 5/2019 RTRW DIY 2019-2039 (Kepala Bappeda DIY, 11 November 2019). Sultan HB X sendiri selaku Gubernur DIY sempat melakukan penolakan tol pada 18 Juli 2017 dengan alasan akan berdampak pada penghidupan pedagang kecil (dev.dishub.jogjapro.go.id, 2017). Gubernur DIY menyatakan tak pernah menolak proyek tol pada 3 Juli 2019 dan mengarahkan proyek harus memperhatikan kelestarian situs sejarah yang dilalui, tak mengorbankan lahan pertanian berkelanjutan, harus menguntungkan warga, dan tidak memisahkan masyarakat (tempo.co, 2019). Proyek tol DIY yang sudah disepakati kemudian terdiri atas tol Solo-Bawen, Kulon Progo (YIA) dan Jogja-Solo sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Rute Jalan tol Jogja-Solo akan melewati 14 desa di 6 kecamatan. Tol Jogja-Bawen akan melewati 7 desa di 3 kecamatan. Tol Kulon Progo akan berdampak pada 16 desa yang dilewati.



Gambar 1. Rute Proyek Tol di DIY

Sumber: Istano, 11 November 2019.

Hasil jaring aspirasi yang dilakukan DPD RI terhadap 56 orang warga Sleman pada 2 November 2019 dan 56 warga Kulon Progo pada 3 November 2019 menunjukkan bahwa mayoritas responden bersikap netral menyikapi proyek tol sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Sebanyak 18% responden dari Sleman terdampak proyek menyatakan setuju terhadap pembangunan tol, sedangkan 20% menyatakan tidak setuju. Sebanyak 14% responden dari Kulon Progo menyatakan setuju dengan proyek tol dan 7% menyatakan tak setuju (Mahmud, 11 November 2019). Mayoritas warga yang bersikap netral menunjukkan bahwa masyarakat terdampak masih berupaya mencermati dan berhati-hati dalam menyikapi pembangunan tol. Gubernur DIY telah mengeluarkan izin penetapan lokasi tol Yogyakarta-Solo pada 10 Juli 2020 melalui Beslit bernomor 206/KEP/2020.

Menurut LBH Yogyakarta, proyek tol minim partisipasi publik disebabkan proyek bahkan telah dirancang sejak tahun 2010. Sosialisasi dan konsultasi yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan tanah sebatas menjadi stempel proyek disebabkan warga terpaksa harus mau menerima disebabkan penguasaan informasi yang berbeda (LBH Yogyakarta, 2020). Proyek infrastruktur penopang turisme massal terus berjalan, meskipun pariwisata DIY terguncang akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,69% berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,59% (tribunnews.com, 2021). Kontraksi diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp138,4 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp101,7 triliun (tribunnews.com, 2021). Kontraksi terutama dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Pemerintah daerah melakukan perencanaan penyelenggaraan paket acara seolah-olah sedang dalam kondisi normal. Dinas Pariwisata DIY meluncurkan Kalender Pariwisata 2021 yang berisi 71 *event*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menggenjot turisme massal, meskipun memiliki kerentanan (harianjogja.com, 2021).



Gambar 2. Sikap Warga Sleman terhadap Proyek Tol di Wilayahnya
Sumber: Mahmud, 11 November 2019.



Gambar 3. Sikap Warga Kulon Progo terhadap Proyek Tol di Wilayahnya
Sumber: Mahmud, 11 November 2019.

Realitas sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa *authoritarian neoliberalism* bergantung pada dua hal, yakni membendung segala bentuk perlawanan terhadap rezim dan memastikan agenda neoliberalisme dapat terus berjalan melalui instrumen kekerasan sekalipun. Rezim *authoritarian neoliberalism* dalam konteks ekspansi turisme massal di DIY berkembang melalui serangkaian langkah terorganisasi dari negara melalui regulasi dan kekuatan represif, demi mengatur kehidupan sosial sesuai kehendaknya (Tansel, 2017). Pemerintah sengaja melindungi proses pembuatan kebijakan dari kemungkinan munculnya diskusi publik secara setara melalui eskalasi manuver kekuatan memaksa dan legitimasi secara legal formal. Pemerintah sengaja memanipulasi pasar sesuai kehendaknya. Pemerintah di sisi lain membiarkan mekanisme pasar yang liar

bekerja mengorbankan masyarakat karena dianggap sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Dengan demikian, orientasi utama dari *authoritarian neoliberalism* dalam konteks DIY adalah mencegah kegagalan mekanisme pasar (Tansel, 2017).

Menurut Guild (2019), megaprojek penunjang turisme massal di DIY seperti YIA, tak dapat dilepaskan dari Undang-Undang 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Regulasi warisan dari pemerintahan sebelumnya tersebut melakukan resentralisasi kewenangan pengadaan tanah pembangunan di tingkat pusat dan memiliki tenggat waktu tahapan pembebasan lahan yang baku, sehingga memudahkan negara dalam memuluskan proyek (Guild, 2019a). Tenggat waktu yang ada dalam setiap tahapan pembebasan lahan membuat warga yang tidak setuju terhadap proyek turisme massal kesulitan untuk mengadvokasi kebijakan. Undangan pun hanya diberikan kepada warga yang menyerahkan bukti hak atas tanahnya. Masyarakat penolak proyek turisme massal sebenarnya memiliki bukti hak atas tanah. Namun, karena tidak menyerahkan sertifikat, mereka dianggap tak memiliki kesempatan untuk diundang dalam forum konsultasi publik (Guild, 2019b).

5. PENUTUP

Kajian ini telah menunjukkan pergeseran dari pariwisata berbasis warga menjadi turisme massal yang didorong oleh pemerintah dan berakibat pada penggunaan instrumen represif serta peminggiran penghidupan masyarakat. Turisme massal yang berkembang di DIY sejak tahun 1980-an bergantung pada kombinasi tiga pola rezim *authoritarian neoliberalism* dengan memanfaatkan pendekatan budaya untuk melegitimasi proyek, menggunakan kekuatan teknokrasi dan legal formal untuk memfasilitasi keberlangsungan program, serta mengerahkan instrumen kekerasan dalam menjamin kelancaran pariwisata massal. Pemerintah sendiri sengaja membiarkan adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja dan pasar tanah, sehingga menyebabkan penghidupan warga menjadi terpinggirkan.

Langkah jangka pendek dapat diambil oleh pemerintah untuk fokus mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan mengoptimalkan ekonomi dari wisatawan domestik. Fokus pada wisatawan domestik dapat menghindari kerentanan dari sektor pariwisata sendiri yang mudah terguncang akibat kondisi krisis maupun sebab penyebaran wabah seperti SARS dan Covid-19. Langkah jangka panjang perlu diambil pemerintah untuk menaikkan kapasitas usaha dari UMKM di DIY yang selama ini mendominasi aktivitas perekonomian. Upaya “menaikkan kelas” UMKM penting untuk memperbaiki penghidupan buruh-buruh informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Bariah, L. S., & Suprpto. (2020). Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 456–462.
- ap1.co.id. (2017). *Angkasa Pura Airports Gelar Pengajian dan Doa Bersama Masyarakat Kulon Progo*. Ap1.Co.Id. Diakses pada 11 Desember 2022 pukul 19.00 dari <https://ap1.co.id/en/information/news/detail/angkasa-pura-airports-gelar-pengajian-dan-doa-bersama-masyarakat-kulon-progo>.
- Aryanto, I. K. (2018). Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus. *Jurnal Perencanaan*, 5, 32–49.

- balairungpress.com. (2017). *Warga Penolak NYIA Alami Pemukulan dan Pemutusan Listrik*. Balairungpress.Com. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.00 dari <https://www.balairungpress.com/2017/12/warga-penolak-nyia-alami-pemukulan-dan-pemutusan-listrik/>
- Bank Indonesia Institute. (2020). *Bersinergi dalam Keistimewaan Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta* (A. Wahid (ed.)). Bank Indonesia Institute.
- Bappeda DIY. (2016). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*.
- Bruff, I. (2014). The Rise of Authoritarian Neoliberalism. *Rethinking Marxism*, 26(1), 113–129.
- Bruff, I., & Tansel, C. B. (2018). Authoritarian neoliberalism: Trajectories of Knowledge Production and Praxis. *Globalizations*, 1–12.
- Clua-Losada, M., & Ribera-Almandoz, O. (2017). Authoritarian Neoliberalism and The Disciplining of Labour. In C. B. Tansel (Ed.), *States of Discipline: Authoritarian Neoliberalism and The Contested Reproduction of Capitalist Order (Transforming Capitalism)* (pp. 29–45). Rowman & Littlefield Publishers.
- Cnnindonesia.com. (2017). *Polisi Tangkap 12 Relawan Penolak Bandara Kulon Progo*. cnnindonesia.com. Diakses pada 10 April 2023 pada pukul 22.05 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171205141840-12-260272/polisi-tangkap-12-relawan-penolak-bandara-kulon-progo>.
- cnnindonesia.com. (2018). *Tolak Bandara, 10 Warga Terluka dan Tiga Relawan Ditangkap*. Cnnindonesia.Com. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.05 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180109192942-20-267722/tolak-bandara-10-warga-terluka-dan-tiga-relawan-ditangkap>.
- Dahles, H. (2002). The Politics of Tour Guiding Image Management in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 29(3), 783–800.
- Dahles, H. (2018). The Sustainability of Small Business Resilience: The Local Tourism Industry of Yogyakarta, Indonesia A Decade after The Crisis. In J. M. Cheer & A. A. Lew (Eds.), *Tourism, Resilience and Sustainability Adapting to Social, Political and Economic Change* (pp. 149–165). Routledge.
- Dahles, H., & Bras, K. (1999). Entrepreneurs in Romance Tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 267–293.
- Dahles, H., & Prabawa, T. S. (2013). Entrepreneurship in The Informal Sector. The Case of The Pedicab Drivers of Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 26(3), 241–259.
- Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). Business Resilience in Times of Growth and Crisis. *Annals of Tourism Research*, 51, 34–50.
- dev.dishub.jogjapro.go.id. (2017). *Sri Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Yogyakarta Tak Butuh Jalan Tol*. Dev.Dishub.Jogjapro.Go.Id. Diakses pada 11 Desember 2022 pukul 20.00 dari <http://dev.dishub.jogjapro.go.id/berita/baca/sri-sultan-hamengku-buwono-x-tegaskan-yogyakarta-tak-butuh-jalan-tol>.
- Dewi, N. L. G. M. P., & Salim, M. N. (2020). *Berakhir di Temon: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)* (T. S. Press (ed.)). STPN Press.
- Gallo, E. (2021). Three Varieties of Authoritarian Neoliberalism: Rule by The Experts, The People, The Leader. *Competition & Change*, 1–21.
- Guild, J. (2019a). *In defence of Jokowiomics*. Newmandala.Org. Diakses pada 6 Desember 2022 pukul 10.00 dari <https://www.newmandala.org/in-defence-of-jokowiomics/>
- Guild, J. (2019b). *The State, Infrastructure and Economic Growth in Jokowi's First Term*. Nanyang Technological University.
- Hampton, M. P. (2003). Entry Points for Local Tourism in Developing Countries: Evidence from Yogyakarta, Indonesia. *Geogr. Ann*, 85 B(2), 85–101.

- harianjogja.com. (2021). *Pandemi, Pariwisata DIY Tidak Boleh Berhenti*. harianjogja.com. Diakses pada 10 Desember 2022 pukul 11.00 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/05/510/1065355/pandemi-pariwisata-diy-tidak-boleh-berhenti>.
- Harrison, G. (2018). Authoritarian Neoliberalism and Capitalist Transformation in Africa: All Pain, No Gain. *Globalizations*, 1–15.
- Haryanto, A. (2017). Babat Alas Nawung Kridha: Babak Baru Bandara Internasional Yogyakarta. *Angkasapura Magazine*, 14–18.
- Hernawan, A., & Dewi, M. P. (2012). Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Yustisia*, 2(2), 19–29.
- Istano, T. (2019). *Diskusi Publik: Mencari Trase Jalan Tol DIY Terbaik University Club*, 11 November 2019.
- Juego, B. (2018). Authoritarian Neoliberalism: Its Ideological Antecedents and Policy Manifestations from Carl Schmitt's Political Economy of Governance. *Administrative Culture*, 19(1), 105–136.
- Kamim, A. B. M. (2019). Paradoks Pembangunan Kemaritiman DIY, Ilusi Kesejahteraan di Balik Upaya Rekayasa Sosial. *Analisis Sosial*, 23(2), 19–47.
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2018). Pemerintah Sebagai Agen Perubahan Sosial yang Direncanakan: Studi Atas Pembangunan Kemaritiman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 95–119.
- Kepala Bappeda DIY. (2019). *Jalan Tol sebagai Bagian Konektivitas Daerah Istimewa Yogyakarta*. Bappeda DIY.
- LBH Jakarta. (2019). *Catatan Akhir Tahun 2019 Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi*. Diakses pada 17 November 2022 pukul 11.00 dari <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Catahu-2019-reformasi-dikorupsi.pdf>
- LBH Yogyakarta. (2013). *Catatan Akhir Tahun 2013 Penegakan Hukum dan HAM LBH Yogyakarta*.
- LBH Yogyakarta. (2016). *Kabut Kelam Sepanjang Tahun Rapor Merah Pelanggaran HAM Catatan Akhir Tahun 2016*.
- LBH Yogyakarta. (2017). *Kinjeng Wesi*. LBH Yogyakarta. Diakses pada 17 November 2022 pukul 13.00 dari <https://www.youtube.com/watch?v=VMfiyL04Zfw>
- LBH Yogyakarta. (2020). *Membunuh Demokrasi Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2020*.
- lpmrheter.com. (2018). *Relawan Ditangkap Saat Pengosongan Lahan Bandara NYIA*. lpmrheter.com. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.15 dari <https://lpmrheter.com/relawan-ditangkap-saat-pengosongan-lahan-bandara-nyia/>
- Mahmud, C. (2019). *Hasil Jaring Aspirasi (JARAS) tentang Rencana Pembangunan Jalan Tol di D.I.Yogyakarta*.
- Manifesty, O. R. (2019). Rapid Growth of Hotels in Yogyakarta and Its Relation to The City's Water Supply. *E-Journal of Tourism*, 6(1), 43–51.
- merdeka.com. (2018). *Tolak pembangunan Bandara NYIA, warga pasang patok tanah*. merdeka.com. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.20 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-pembangunan-bandara-nyia-warga-pasang-patok-tanah.html>
- mongabay.co.id. (2017a). *Kala Warga Terus Bertahan, Tak Rela Lahan jadi Bandara Baru Yogyakarta (Bagian 2)*. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.22 dari <https://www.mongabay.co.id/2017/12/15/kala-warga-terus-bertahan-tak-rela-lahan-jadi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-2/>
- mongabay.co.id. (2017b). *Ketika Lahan Subur Warga Tergusur Demi Bandara Baru Yogyakarta (Bagian 1)*. mongabay.co.id. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.22 dari <https://www.mongabay.co.id/2017/12/12/ketika-lahan-subur-warga-tergusur-demi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-1/>

- Novandre, I. E. (2019). *Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2018)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nugraha, D. C. (2018). *Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Angkatan Kerja dan Upah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2015*. Universitas Sanata Dharma.
- Nusa, A. T. S., & Khoirudin, R. (2020). Analisis Determinan PAD Sub Sektor Pariwisata di DIY Periode 2012-2017. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 3(1), 1-11.
- Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). (2018). *Kronologi Perampasan Barang dan Penggusuran Rumah Warga Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) 19-20 Juli 2018*. <http://ksn.or.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Kronologi-Penggusuran-Paksa-PT-Angkasa-Pura-I-Terhadap-Warga-PWPP-KP-6-20-Juli-2018.pdf>
- Riadi, S. (2018). Ruang Representasi Kampung Turis: Ketimpangan Sosio-Geografis dan Penjualan Tanah di Prawirotanaman Yogyakarta. *Jurnal Emik*, 1(1), 19-36.
- Sesanti, A. D. (2016). *JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL Manunggaling Penguasa dan Pengusaha dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta* (Tim STPN Press (ed.)). STPN Press.
- solopos.com. (2018). *BANDARA KULONPROGO : Begini Nasib Warga Terdampak NYIA Setelah Tergusur*. solopos.com. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 19.00 dari <https://www.solopos.com/bandara-kulonprogo-begini-nasib-warga-terdampak-nyia-setelah-tergusur-896357>
- Sörensson, E. (2008). *Making A Living in The World of Tourism Livelihoods in Backpacker Tourism in Urban Indonesia*. Umeå University.
- Stubbs, P., & Lendvai-Bainton, N. (2019). Authoritarian Neoliberalism, Radical Conservatism and Social Policy within The European Union: Croatia, Hungary and Poland. *Development and Change*, 1-21.
- Suharyanto, I., Aalst, I. van, Liempt, I. van, & Zoomers, A. (2021). More than Jedug-jedug: Dynamics of Discontent with Tourist Activity in Prawirotanaman, Yogyakarta. *Tourism Geographies*, 1-21.
- Sulistya, A. B. (2016). *Tren Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2014*. Universitas Sanata Dharma.
- Suparwoko, W. (2012). Community-Based Analysis of Tourism Development in Yogyakarta. In W. Suparwoko (Ed.), *Towards Responsible Tourism: A Community-based Approach to Tourism Development in Indonesia* (pp. 176-247). Lambert Academic Publishing.
- Tansel, C. B. (2017). Authoritarian Neoliberalism: Towards A New Research Agenda. In C. B. Tansel (Ed.), *States of Discipline Authoritarian Neoliberalism and The Contested Reproduction of Capitalist Order* (pp. 1-29). Rowman & Littlefield International Ltd.
- Tansel, C. B. (2018). Reproducing Authoritarian Neoliberalism in Turkey: Urban Governance and State Restructuring in The Shadow of Executive Centralization. *Globalizations*, 1-15.
- tempo.co. (2019). *Sultan HB X Tak Menolak Tol, Asal Empat Hal Ini Jadi Perhatian*. tempo.co. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 19.30 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1220961/sultan-hb-x-tak-menolak-tol-asal-empat-hal-ini-jadi-perhatian>.
- tirto.id. (2017a). *Kronologi Pengosongan Lahan untuk Bandara Menurut Warga Kulon Progo*. tirto.id. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.30 dari <https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH>.
- tirto.id. (2017b). *ORI DIY Terima Aduan Soal Pengosongan Lahan Bandara Kulon Progo*. tirto.id. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.30 dari <https://tirto.id/ori-diy-terima-aduan-soal-pengosongan-lahan-bandara-kulon-progo-cAQG>.

- tirto.id. (2017c). *Petani Kulon Progo Keluhkan Tindakan AP 1 Soal Lahan Bandara*. tirto.id. Diakses pada 10 April 2023 pukul 22.30 dari <https://tirto.id/petani-kulon-progo-keluhkan-tindakan-ap-1-soal-lahan-bandara-cAXb>.
- tirto.id. (2018a). *Minim Pekerjaan untuk Warga Tergusur di Bandara Baru Yogyakarta*. Tirto.Id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.30 dari <https://tirto.id/minim-pekerjaan-untuk-warga-tergusur-di-bandara-baru-yogyakarta-cU5v>.
- tirto.id. (2018b). *Permainan Broker dan Harga Tanah Selangit di Dekat Bandara NYIA*. tirto.id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.30 dari <https://tirto.id/permainan-broker-dan-harga-tanah-selangit-di-dekat-bandara-nyia-cU5K>.
- tirto.id. (2018c). *"Untuk Bekerja di Bandara NYIA Diserahkan pada Pertarungan Terbuka."* tirto.id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.40 dari <https://tirto.id/untuk-bekerja-di-bandara-nyia-diserahkan-pada-pertarungan-terbuka-cU5S>.
- tirto.id. (2019a). *Inkonsistensi PHRI Soal Moratorium Pembangunan Hotel di Yogyakarta*. tirto.id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.45 dari <https://tirto.id/inkonsistensi-phri-soal-moratorium-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-ddbG>.
- tirto.id. (2019b). *Pemkot Yogya Kembali Buka Izin Pembangunan Hotel*. tirto.id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.30 dari <https://tirto.id/pemkot-yogya-kembali-buka-izin-pembangunan-hotel-dc7c>.
- tirto.id. (2020). *Nasib Perempuan Gusuran Bandara YIA: dari Petani Jadi Pengangguran*. tirto.id. Diakses pada 13 Desember pukul 22.30 dari <https://tirto.id/nasib-perempuan-gusuran-bandara-yia-dari-petani-jadi-pengangguran-fhCx>.
- tribunnews.com. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi DI Yogyakarta Tahun 2020 Alami Kontraksi Sebesar 2,69 Persen*. tribunnews.com. Diakses pada 13 Desember pukul 22.30 dari <https://jogja.tribunnews.com/2021/02/05/pertumbuhan-ekonomi-di-yogyakarta-tahun-2020-alami-kontraksi-sebesar-269-persen>
- Ulumuddin, I. A., & Darwin, M. M. (2021). Ambiguitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Moratorium Izin Usaha Hotel, Apartemen dan Kondotel. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 67–85.
- Vainikka, V. (2013). Rethinking Mass Tourism. *Tourist Studies*, 13(3), 268–286.
- Wahyuningsih, P. T. (2019). Analisis Perencanaan Penanggulangan Risiko Ketimpangan Ekonomi pada Bidang Pengurangan Kemiskinan di Bappeda DIY. *Jurnal Enersia Publika*, 3(1), 1–14.
- Widianto, H. W., & T.Keban, Y. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 19(2), 107–123.
- Yusuf, M., & Purwandani, I. (2020). Ecological Politics of Water: The Ramifications of Tourism Development in Yogyakarta. *South East Asia Research*, 1–17.